

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu” ini ditulis oleh Ine Maulid Wafiq Nazila, NIM. 12103183012, Progran Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022, dibimbing oleh Ahmad Gelora Mahardika, S.IP, M.H

Kata Kunci : Implementasi, Penyelenggaraan Perlindungan, Perempuan dan Anak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Batu. Ini menjadi persoalan dimana pemerintah sesungguhnya sudah membuat peraturan tentang hukuman untuk pelaku kekerasan, namun ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut. Sehingga dibentuklah Peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu yang pada pasal 6 huruf b menjelaskan bahwa pemerintah menunjuk lembaga yakni lembaga P2TP2A untuk memberi pendidikan nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian, perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut di lapangan.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b telah diimplementasikan? 2) Apakah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 6 Ayat (1) huruf c telah diimplementasikan? 3) Apakah kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diambil dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, teknik pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi olah data SPSS. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah cara uji validitas dan reliabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat (1) huruf b belum diimplementasikan dengan baik. Karena kurang dari 60% responden tidak mengerti tentang nilai-nilai anti kekerasan 2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat (1) huruf c belum diimplementasikan dengan baik. Karena kurang dari 50% responden tidak pernah mendapatkan sosialisasi oleh pemerintah terkait kekerasan. 3) Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam implementasi perda adalah kurangnya anggota sebagai tim reaksi cepat, biaya operasional yang memadai, hambatan pada komunikasi lintas sektor, dan tim penyuluh yang terbatas. Solusi yang dapat diambil adalah dengan menambah anggota sebagai tim reaksi cepat, P2TP2A seharusnya mendapatkan anggaran dana darurat dari pemerintah, memberikan prioritas pada prosedur lintas sektor untuk orban kekerasan, serta segera membentuk tim penyuluh untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

ABSTRACT

This thesis entitled “Implementation of Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 Concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Batu City” was written by Ine Maulid Wafiq Nazila, NIM. 12103183012, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung State Islamic University 2022, supervised by Ahmad Gelora Mahardika, S.IP, M.H

Keywords: Implementation, Implementation of Protection, Women and Children

The background of this research is that there are still many cases of violence against women and children in Batu City. This is a problem where the government has actually made regulations regarding punishment for perpetrators of violence, but in fact there are still many people who do not know about these regulations. So that the regulation was formed, namely Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Batu City which in article 6 letter b explains that the government appoints an institution, namely the P2TP2A institution to provide education on values of anti-violence against women and children . Then, research is needed to find out how the regional regulations are implemented in the field.

The formulation of the problems used in this study are: 1) Has the Regional Regulation of Batu City Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence Article 6 Paragraph (1) letter b has been implemented? 2) Has the Regional Regulation of Batu City Number 2 of 2013 Concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence Article 6 Paragraph (1) letter c has been implemented? 3) What are the obstacles encountered and the solutions that can be taken in implementing the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Batu City?

The research method used is a qualitative method, data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is editing, classifying, and analyzing. The data validity technique used is a way to test credibility through a triangulation process.

The results of this study indicate that: 1) Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 Article 6 Paragraph (1) letter b has not been implemented properly. Because less than 60% of respondents do not understand the values of non-violence 2) Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 Article 6 Paragraph (1) letter c has not been implemented properly. Because less than 50% of respondents have never received socialization by the government regarding violence. 3) The obstacles faced by P2TP2A in implementing regional regulations are the lack of members as a quick reaction team, adequate operational costs, obstacles to cross-sectoral communication, and a limited extension team. The solution that can be taken is to add members as a rapid reaction team, P2TP2A should receive an

emergency budget from the government, give priority to cross-sectoral procedures for victims of violence, and immediately form an extension team to provide outreach to the community.